

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Coca-Cola adalah jenis produk minuman yang ditemukan oleh seorang farmasi dari Atlanta, Georgia, yang bernama John Pemberton<sup>1</sup>. Produk ini selanjutnya mengalami perkembangan hingga terdaftar sebagai *trademark* pada tahun 1887. Pada tahun 1906, Coca-Cola melakukan ekspansi internasional dengan membuka *bottling plants* di Canada, Cuba dan Panama. Ekspansi tersebut terus berlanjut hingga pada tahun 1920 Coca-Cola telah membuka *bottling plants* di 27 negara<sup>2</sup>. Dalam melakukan ekspansi tersebut, salah satu strategi yang dijalankan oleh Coca-Cola adalah *international marketing strategy* berupa *localization*<sup>3</sup>. *Localization* juga merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam *political risk management*. *Localization* dilakukan oleh Coca-Cola dengan pendekatan “*think local, act local*”. Pendekatan tersebut berjalan secara efektif di beberapa negara. Di China misalnya, Coca-Cola mengalami peningkatan keuntungan sebanyak 8% di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2000. Hal tersebut secara tidak langsung berkorelasi dengan kebijakan Coca-Cola memberikan hak kontrol periklanan kepada manajer lokal untuk

---

<sup>1</sup> Jennifer Kaye, “Coca-Cola India”. (Dartmouth : Tuck School of Business ,2004). 1-30

<sup>2</sup> Michael Ba Banutu, “Coca-Cola: International Business Strategy for Globalization”. (2012). 155-169

<sup>3</sup> Ba Banutu, “Coca-Cola International Business Strategy for Globalization”. 158

memasukkan zodiak China dan festival musim semi pada iklan televisi<sup>4</sup>. China merupakan salah satu contoh negara totalitarian yang masih bertahan hingga saat ini<sup>5</sup>. Oleh karena itu, keberhasilan di China merupakan suatu keberhasilan yang cukup besar bagi Coca-Cola. Hal ini karena tantangan negatif bagi perusahaan dalam berinvestasi di negara totalitarian adalah pemberian uang suap atau kehilangan akses terhadap pasar atau bahkan penyitaan aset<sup>6</sup>. Sedangkan keberhasilan Coca-Cola di Peru disebabkan strategi Coca-Cola yang memosisikan diri sebagai perusahaan Peruvians yang bermarkas besar di United States. Image lokal ini kemudian memunculkan kepercayaan dari masyarakat Peruvian dimana Coca-Cola adalah perusahaan global yang sifatnya menguntungkan dan tidaklah mengancam. Hal tersebut menguntungkan Coca-Cola karena memudahkan penetrasi terhadap pasar Peru.

Coca-Cola juga memiliki sejarah tertentu dalam berinvestasi di India. Coca-Cola merupakan salah satu produk yang unggul di India hingga tahun 1977. Namun hal tersebut berakhir dikarenakan Coca-Cola memutuskan berhenti berinvestasi di India semenjak diberlakukannya *Foreign Exchange Regulation Act* (FERA). Kebijakan tersebut mengharuskan perusahaan asing, termasuk Coca-Cola untuk menunjukkan formula dan mengurangi *equity stake* dalam perusahaan. Lalu 16 tahun kemudian, pada 1993 Coca-Cola kembali memasuki pasar India kembali dan

<sup>4</sup> Ba Banutu, "Coca-Cola: International Business Strategy for Globalization". 158

<sup>5</sup> John J. Wild, "International Business: The Challenge of Globalization". (New Jersey: Prentice Hall, 2008) : 82 - 97

<sup>6</sup> Wild, "International Business: The Challenge of Globalization". 86

menunjukkan kemampuan dalam menguasai pasar dengan mengakuisisi perusahaan beverage lokal bernama Thums Up<sup>7</sup>. Semenjak tahun 1993 hingga 2005 Coca Cola telah berinvestasi sebanyak 1 milyar US\$ sehingga memposisikan Coca-Cola sebagai salah satu investor terkemuka di India. Pada tahun 2002 Coca-Cola bahkan mengalami pertumbuhan volume perusahaan sebanyak 39% dan pertumbuhan industri sebanyak 23% skala nasional yang menunjukkan kondisi keuntungan Coca-Cola yang paling tinggi selama berinvestasi di wilayah India<sup>8</sup>.

Terdapat 2 jenis strategi *localization* yang dilakukan oleh Coca-Cola di India, yaitu India A: “Life ho to aisi” (*life as it should be*) ; dan India B: “Thanda Matlab Coca-Cola” (*coke means refreshment*)<sup>9</sup>. Strategi India A tersebut ditujukan pada wilayah metropolitan dan kota besar, yang merupakan 4% populasi dari India. Strategi tersebut berupa *tagline* yang bertujuan untuk menunjukkan asumsi adanya kebutuhan ikatan sosial ,suatu aspirasi dan perayaan kebebasan sosial dan ekonomi. Sedangkan strategi India B ditujukan pada wilayah kota kecil dan wilayah desa, yang merupakan 96% populasi. Secara umum, produk Coca-Cola di wilayah urban India berukuran 300 ml dengan harga 10 Rupee. Selanjutnya Coca-Cola memunculkan produk berukuran 200ml namun dengan harga 5 Rupee, sehingga produk tersebut mampu bersaing dengan produk softdrink lainnya. Harga yang dapat dijangkau oleh populasi wilayah desa dan disertai tagline semakin menarik minat konsumen. Strategi ini berjalan secara efektif hingga pada tahun 2003 Coca-Cola mengalami

---

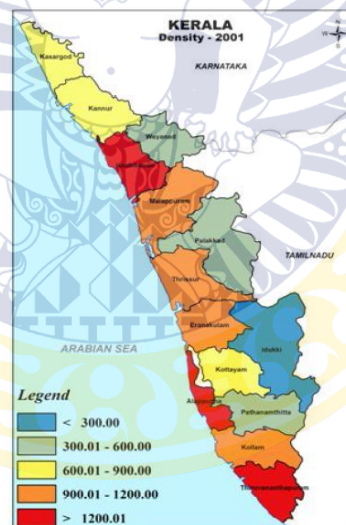
<sup>7</sup> Kaye, “Coca-Cola India”. 1

<sup>8</sup> Kaye, “Coca-Cola India”. 3

<sup>9</sup> Kaye, “Coca-Cola India”. 4

pertumbuhan keuntungan sebanyak 37% pada segmentase India A, dan 24 % pada segmentase India B. Coca Cola berinvestasi di India dengan trademark Hindustan Coca Cola Beverages Ltd (HCBL) <sup>10</sup>. HCBL memiliki 4 tempat yang berfungsi sebagai *bottling plants*, yaitu di Plachimada (Kerala), Mehdiaganj (Uttar Pradesh), Silvaganga (Tamilnadu) dan Kala Dera (Rajasthan) <sup>11</sup>. Dari empat wilayah tersebut, Plachimada merupakan wilayah dengan porsi *bottling plant* paling besar diantara 3 wilayah lainnya. HCBL berinvestasi di Plachimada dengan ijin dari pemerintahan pusat India dan lisensi oleh pemerintahan setempat yaitu Perumatty Gram Panchayat.

Peta 1.1.1 Distrik Palakkad, Kerala <sup>12</sup>



<sup>10</sup> Lakshmy Devi, "Multi National Corporation, Development Discontent, and Civil Society: The Pathology of People's Movement against Coca Cola in India" (2006). 13-18

<sup>11</sup> Devi, "Multi National Corporation, Development Discontent, and Civil Society: The Pathology of People's Movement against Coca Cola in India". 14

<sup>12</sup> Department of Town and Country Planning, Kerala (2013)

Plachimada merupakan salah satu desa di distrik Palakkad, Negara bagian Kerala. Selain berada pada sistem negara Kerala, Plachimada berada dibawah perlindungan pemerintahan lokal Perumatty Gram Panchayat India. Pemerintahan lokal tersebut merupakan bentuk desentralisasi dari negara Kerala pasca kebijakan Panchayat Raj Act 1994. Panchayat Raj India (PRIs) atau pemerintahan lokal ini dibagi dimana pada tingkat desa bernama Gram Panchayat, pada tingkat distrik bernama District Panchayat / Zilla Parishad, dan pada tingkat menengah yaitu Block Panchayat / Panchayat Samithi<sup>13</sup>. Block Panchayat / Panchayat Samithi hanya terletak pada negara bagian yang memiliki populasi lebih dari 2 juta penduduk. Distrik Palakkad merupakan daerah yang berperan penting dalam sektor agrikultur. Peran penting tersebut menyebabkan Kerala disebut sebagai „rice bowl Kerala“<sup>14</sup>. Berdasarkan peta diatas, tingkat kepadatan penduduk di distrik Pallakad termasuk dalam jangkauan rendah yaitu pada tingkat ke-2. Mayoritas penduduk yang tinggal di Plachimada adalah *Adhivasis* dan *Dalits*. *Adhivasis* merupakan masyarakat asli atau masyarakat kesukuan, sedangkan *Dalits* merupakan masyarakat yang berasal dari kasta terendah. Mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk tersebut adalah sektor tradisional atau pertanian.

Kemunculan *Multi National Corporation* (MNC) dengan skala global seperti Coca-Cola diharapkan memicu pertumbuhan perekonomian pada sektor industri. Namun pada saat HCBL berinvestasi terdapat berbagai macam permasalahan.

<sup>13</sup> Pillai, „Democratic Decentralizaion, Participatory Development and Civil Society: The Story of People’s Campaign for Decentralizaed Planning in India”, 15

<sup>14</sup> Sujith Koonan, “Legal Implication of Plachimada “ IELRC Working Paper (2007): 1 -17

Permasalahan ini bermula pada kasus kekeringan yang dialami oleh masyarakat. Di daerah Plachimada *bottling plant* HCBL membutuhkan 1,5 juta liter air per hari<sup>15</sup>. HCBL yang beroperasi di Plachimada hanyalah memiliki lahan sebesar 34 are, namun jumlah air yang di ekstraksi dari tanah sangatlah besar. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi air tanah yang turun dari 45 meter menjadi 100 meter dibawah permukaan tanah<sup>16</sup>. Seiring dengan produksi yang terus menerus dilakukan HCBL dalam menjual *beverage* tersebut, diluar pabrik masyarakat sekitar mengalami kekeringan dan mengalami krisis air. Selain itu terdapat pula isu mengenai polusi lingkungan karena HCBL tidak melakukan manajemen limbah dengan baik sehingga menurunkan kualitas air yang tersedia<sup>17</sup>. Namun HCBL tetap menjaga kredibilitas image perusahaan, dimana dalam Annual Report 2002 terdapat pernyataan yang menunjukkan kinerja perusahaan yang ramah lingkungan di India (lihat lampiran 1)<sup>18</sup>.

Tahun 2002 merupakan tahun awal dimana HCBL mengalami banyak tantangan untuk terus berinvestasi di Plachimada. Perumatty Gram Panchayat mengeluarkan kebijakan “Ground Water Act” yang bertujuan untuk mengatur sistem konservasi air dan juga mengatur mengenai penggunaan air tanah<sup>19</sup>. Namun, hingga

<sup>15</sup> Devi. “Multi National Corporation, Development Discontent, and Civil Society: The Pathology of People’s Movement against Coca Cola in India “. 15

<sup>16</sup> Anonim, “Corporate Accountability International Coke in India: a not-so-silent spring.” <http://www.stopcorporateabuse.org/cms/page1764.cfm> (diakses pada 8 Agustus 2014)

<sup>17</sup> Vandana Shiva, “Resisting the Water Privatization, Building the Water Democracy”, A Paper on the Occasion of the Water World Forum in Mexico City (March, 2006), 1-16

<sup>18</sup> Coca-Cola, “Annual Report 2002: Strengthening Our Business by Strengthening Our Communities”, (The Coca-Cola Company, 2003) 1-114

<sup>19</sup> Annapoorna Karthika, “Bottling Up a Corporate Giant: Victory of a Mass movement”, (Political Science Delhi: Delhi University, 22 Agustus 2008). 1-9

2003 kebijakan ini masih belum disetujui oleh pemerintah pusat Kerala <sup>20</sup>. Tantangan lainnya adalah terbentuknya „Coca Cola Virudha Jamaeeya Samara Samithy“(CCVJSS) atau Anti Coca Cola Peoples Struggle Comittee pada 22 April 2002 yang merupakan *Earth Day*<sup>21</sup>. Aksi protes ini dilakukan oleh 300 orang yang mayoritas adalah *adhivasis*. Pada pergerakan ini terdapat banyak aksi yang digunakan, yaitu dengan melakukan *dharnas, blokade, sit-ins, marches, public rallies* dan *meeting*<sup>22</sup>. Institusi pemerintah Perumatty Gram Panchayat pada 7 April 2003, memutuskan untuk tidak memperbarui ijin lisensi HCBL untuk beroperasi <sup>23</sup>. Selanjutnya, HCBL mengajukan banding pada Kerala High Court dengan hasil pernyataan Kerala High Court bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan permasalahan lingkungan yang terjadi berhubungan dengan HCBL. Perlawanan antara HCBL, Perumatty Gram Panchayat dan masyarakat terus terjadi dan berhenti seiring dengan berakhirnya investasi HCBL di Plachimada India pada akhir tahun 2005.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka penulis merumuskan pertanyaan agar penelitian berfokus , yaitu: Bagaimana mekanisme pemerintahan lokal Perumatty Gram Panchayat dalam menghentikan investasi HCBL di wilayah Plachimada, India tahun 2005.

<sup>20</sup> Karthika, ”Bottling Up a Corporate Giant: Victory of a Mass movement”,7

<sup>21</sup> Bishnupriya Ghosh. “Looking through HCBL: Global Icons and the Popular”.Public Culture 22, no. 2 (2002) : 333-368.

<sup>22</sup> Sabhu Thomas. ”New Social Movement” .(2011),.31

<sup>23</sup> Ghosh, ” Looking through HCBL: Global Icons and the Popular”. 333-368.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan perspektif maupun teori untuk menjelaskan kasus dalam penelitian ini. Perspektif yang digunakan oleh penulis adalah Ekofeminisme, sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah Deprivasi Relatif, Political System dan Political Risk. Penulis menggunakan perspektif ekofeminisme untuk menjembatani logika dalam memahami hubungan antara teori deprivasi relatif, Political System dan Political Risk. Ekofeminisme merupakan istilah yang digunakan semenjak tahun 1974 pada aksi Francois d'Eaubonne untuk menunjukkan potensi wanita dalam revolusi ekologi<sup>24</sup>. Penulis menggunakan teori The Master Model yang merupakan filosofi ekofeminisme yang menjelaskan bahwa sifat oppresif manusia terhadap alam disebabkan dualisme hierarki yang berasal pada kebudayaan barat<sup>25</sup>. The Master Model menjelaskan adanya perpotongan antara 3 fenomena keadilan lingkungan, yaitu: *environmental sexism*, *environmental racism* dan *environmental classism*. *Environmental sexism* menjelaskan adanya sudut pandang yang memposisikan perempuan maupun air sebagai subordinat. Air merupakan suatu pelayan untuk populasi dominan oleh karenanya suatu kewajiban bagi air untuk mengalami proses eksploitasi. Dijelaskan pula bahwa air yang bersih dalam hal ini pun diidentifikasi secara serupa dengan pekerjaan perempuan karena tidak termasuk

<sup>24</sup> Karen J Warren. "Broader Concerns: Thoreau, Deep Ecology, and Ecofeminism". 416-430

<sup>25</sup> Greta Gaard. "Woman, water, energy: an ecofeminist approach". (2001) 157 - 170



dalam sistem akuntansi nasional<sup>26</sup>. Marilyn Waring menjelaskan bahwa dalam sistem akuntansi kolonial pada negara maju air bersih yang diperoleh oleh perempuan tidaklah memiliki nilai, sedangkan air yang diperoleh melalui pipa-pipa memiliki nilai. Danau yang memiliki air bersih dalam hal ini pun tidak memiliki nilai, hingga terjadi proses polusi terhadap air danau sehingga mengharuskan adanya proses pembersihan danau oleh pihak tertentu. *Environmental racism* dan *environmental classism* memiliki penggambaran yang serupa dimana terjadi proses subordinasi<sup>27</sup>.

*Environmental racism* dalam hal ini menjelaskan asosiasi secara konseptual antara alam dan ras non kulit putih<sup>28</sup>. Ras kulit putih memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi air yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada masyarakat non kulit putih. Sedangkan *environmental classism* digambarkan dengan adanya proses dominasi terhadap air dan lingkungan oleh ras kulit putih hingga akhirnya menyebabkan kerugian terhadap komunitas tertentu. Perspektif ekofeminisme memberikan gambaran mengenai proses dimana terdapat perbedaan kebudayaan yang jelas antara ras kulit putih dan ras non kulit putih. Dijelaskan pula bahwa terdapat kecenderungan bagi ras kulit putih melakukan eksploitasi terhadap air dan alam sehingga memberikan kerugian pada ras lainnya. Hal ini tentu menimbulkan konflik.

Proses kemunculan konflik tersebut penulis jelaskan dengan menggunakan teori

#### Deprivasi Relatif.

<sup>26</sup> Ras non kulit putih digunakan oleh penulis untuk menyebutkan ras masyarakat selain keturunan Euro-America terutama penduduk asli atau *indigenous*. Artikel yang digunakan penulis menjelaskan bahwa masyarakat Euro-America memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi lingkungan, suatu hal yang berbeda dengan masyarakat non kulit putih.

<sup>27</sup> Gaard. "Woman, water, energy: an ecofeminist approach". (2001) 158

<sup>28</sup> Gaard. "Woman, water, energy: an ecofeminist approach". (2001) 159

Deprivasi relatif merupakan istilah yang digunakan oleh Ted Robert Gurr dalam bukunya yang berjudul “*Why Men Rebel*”. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan korelasi hubungan sebab akibat yang menyebabkan adanya suatu bentuk perlawanan baik oleh individu maupun kelompok. Definisi deprivasi relatif ialah persepsi aktor yang berbeda dimana *expectation value* dan *capability value* berada pada kondisi yang berbeda<sup>29</sup>. *Expectation value* merupakan kondisi kemampuan dalam bentuk materi maupun sisi keamanan hidup yang orang percaya mereka peroleh. *Capability value* merupakan kondisi kemampuan baik materi maupun sisi keamanan hidup yang mampu mereka peroleh dan miliki. Ketidak keseimbangan pada kedua aspek nilai inilah yang kemudian memunculkan asumsi antara keadilan maupun kelayakan dari suatu kebijakan terhadap apa yang mereka peroleh.

Deprivasi relatif menjelaskan adanya tiga nilai yang memberi motivasi pada aktivitas manusia, yaitu: *welfare value*, *power value* dan *interpersonal value* yang memberikan pengaruh pada proses deprivasi relatif<sup>30</sup>. *Welfare values* berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengakses barang-barang fisik dan kenyamanan fisik. Barang-barang fisik merupakan barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti tempat tinggal, makanan dan layanan kesehatan. Sedangkan kenyamanan fisik merupakan akses untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan fisik dan mental. *Power value* disini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi aksi orang lain dan juga kemampuan seseorang untuk

<sup>29</sup> Ted Robert Gurr. “*Why Men Rebel*”,(New Jersey: Princeton University Press), 24 - 25

<sup>30</sup> Gurr. “*Why Men Rebel*”. New Jersey: Princeton University Press . 25

menghindari campur tangan pihak lain dalam urusannya. Hal tersebut dikategorikan dalam aspek keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif dan keinginan untuk *self-determination* dan keamanan. *Self-determination* dan keamanan disini digambarkan dengan kondisi keinginan untuk memiliki hak-hak dan kebebasan. Sedangkan *interpersonal values* disini ialah kondisi dimana terdapat tingkat kepuasan psikologis seseorang dalam memiliki proses komunikasi dengan pihak-pihak *non-authoritative* seperti keluarga dan kelompok tertentu. Deprivasi relatif menjelaskan mengenai kemungkinan berbagai individu dan lapisan masyarakat dalam mengidentifikasi proses deprivasi hingga memberikan motivasi tertentu. Permasalahan-permasalahan pada sekelompok masyarakat atau individu dengan dampak yang signifikan tentu menjadi sorotan bagi negara. Tindakan lebih lanjut terkait permasalahan ini dipengaruhi oleh bentuk Political System suatu negara. Selanjutnya, penulis menggunakan Political System dan Political Risk untuk mengkaji korelasi antara masyarakat, respon pemerintah dan pelaku bisnis.

Untuk menjamin keberhasilan berbisnis, bisnis internasional memiliki hubungan erat dengan Political System maupun Political Risk Management. Political System menjelaskan mengenai mekanisme pemerintahan yang meliputi struktur, proses, dan berbagai aktivitas terkait. Dalam hal ini bisnis internasional cenderung membentuk strategi berdasarkan identifikasi terhadap sistem politik suatu negara. Lebih lanjut lagi, sistem politik berhubungan dengan partisipasi politik, dan

korelasi antara politik budaya<sup>31</sup>. Partisipasi politik dapat diidentifikasi dengan mengamati siapa dan sejauh apa anggota masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi terjadi ketika seseorang menyuarakan opini mereka, voting, dan menunjukkan penerimaan maupun penolakan terhadap sistem tertentu. Bentuk partisipasi politik yang terjadi pada suatu negara dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi negara dalam bentuk demokrasi atau otoriter. Sedangkan politik dan budaya memiliki hubungan yang erat karena sistem politik negara selalu berakar pada sejarah dan budaya masyarakat<sup>32</sup>.

Sistem Politik yang berada pada suatu negara selanjutnya menentukan bentuk dari *political risk*. *Political risk* adalah kemungkinan dimana pemerintah atau masyarakat mengalami perubahan politik yang secara negatif memberi dampak terhadap aktivitas bisnis. *Political risk* memiliki tipe-tipe seperti: (1.) *conflict and violence*; (2.) *terrorism and kidnapping*; (3.) *property seizure*; (4.) *policy changes*; dan (5.) *local content requirements*. Dalam kasus HCBL Plachimada ini, penulis lebih memfokuskan pada tipe ke-4 yaitu *policy changes*. *Policy changes* merupakan tipe *political risk* yang terjadi karena pemerintahan setempat mendapatkan berbagai macam pengaruh, seperti partai politik yang berkuasa, tekanan politik dari pihak berkepentingan tertentu, dan pihak sipil atau sosial tertentu<sup>33</sup>.

Untuk menghadapi ancaman dari *political risk*, perusahaan mengimplementasikan *managing political risk*. *Managing political risk* dibagi dalam

<sup>31</sup> Wild, "International Business: The Challenge of Globalization". 82

<sup>32</sup> Wild, "International Business: The Challenge of Globalization". 82

<sup>33</sup> Wild, "International Business: The Challenge of Globalization". 94

3 metode, yaitu: (1.) *adaptation*; (2.) *information gathering*; dan (3.) *influencing local politics*<sup>34</sup>. *Adaptation* merupakan upaya untuk menyesuaikan resiko dalam strategi bisnis, terutama melibatkan bantuan pihak lokal. Dalam metode *adaptation* terdapat *localization* dimana perusahaan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan lokal. Cara yang cenderung digunakan adalah meminimalisir adanya ketimpangan budaya perusahaan dan negara. *Information gathering* merupakan upaya untuk meminimalisir resiko dengan mengumpulkan informasi dengan tujuan prediksi. Sedangkan *Influencing local politics* dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan hukum oleh pemerintahan dalam suatu negara. *Influencing local politics* diterapkan perusahaan karena hukum yang ada pada tiap negara pasti mengalami perubahan. *Influencing local politics* diimplementasikan dalam bentuk lobi secara langsung ataupun tidak langsung pada politisi dan *law maker*.

#### 1.4 Sintesis Teori

Pihak berpengaruh pertama yang penulis asumsikan dalam kasus kegagalan investasi perusahaan HCBL ini adalah masyarakat Plachimada. Hal ini dikarenakan masyarakat Plachimada yang pertama kali menyatakan akar permasalahan pada HCBL. Deprivasi relatif merupakan teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan proses identifikasi permasalahan ini. Proses kemunculan perlawanan ini disebabkan adanya perasaan ketidakadilan karena mengalami proses deprivasi. Pada deprivasi relatif, dijelaskan bahwa manusia mengidentifikasi apa yang ia miliki dan apa hak

<sup>34</sup> Wild. "International Business: The Challenge of Globalization".96

yang dapat ia peroleh. Hal tersebut dijelaskan dengan *capabilities values* dan *expectation values*. Pada kasus ini, masyarakat Plachimada melalui aktivitas sehari-hari melalui proses identifikasi terhadap apa yang ia miliki dan apa yang menjadi hak nya. Air merupakan apa yang diidentifikasi oleh masyarakat Plachimada sebagai sumber daya yang terdeprivasi dikarenakan jumlahnya menurun secara drastis dan juga mengalami penurunan kualitas air. Perubahan jumlah air yang drastis dalam hal ini bukanlah suatu hal yang alamiah. Perubahan rasa dan warna pada air yang didapatkan oleh masyarakat Plachimada semakin meningkatkan perasaan ketidakadilan ini. Hal tersebut kemudian memicu motivasi masyarakat Plachimada dalam melakukan perlawanan ini. Motivasi masyarakat Plachimada termasuk dalam kategori *welfare values* karena kebutuhan masyarakat Plachimada disini adalah mendapatkan kembali lingkungan hidup yang sehat dan akses air seperti sebelumnya. Penulis menemukan sisi unik dimana kemunculan deprivasi relatif pada kasus ini hanya mampu muncul pada pola masyarakat dengan kehidupan seperti masyarakat Plachimada. Kebutuhan masyarakat Plachimada terhadap air dipenuhi dengan mengakses langsung air tersebut pada sumur dan melalui sumber mata air lainnya.

Aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam secara langsung mengalami konflik dengan kinerja HCBL dan dapat diidentifikasi dengan menggunakan teori The Master Model milik Plumwood. The Master Model menjelaskan proses eksploitasi terhadap alam yang merupakan proses dari pertentangan kebudayaan yang berbeda. Pertentangan tersebut kemudian memberikan

pengaruh kepada perempuan, masyarakat tradisional maupun komunitas tertentu. Perusahaan HCBL dalam teori The Master Model digambarkan sebagai masyarakat Euro-American yang memiliki kecenderungan untuk melakukan eksploitasi terhadap alam. Permasalahan ini secara tidak langsung terjadi beriringan dengan kemampuan masyarakat Euro-America untuk mampu menjangkau wilayah lain seiring dengan perkembangan teknologi dan melakukan eksploitasi terhadap alam sekitar. HCBL sebagai perusahaan yang juga memiliki latar belakang erat dengan ras Euro-America semakin mendukung asumsi ini. Terlebih lagi, proses eksploitasi yang dilakukan oleh HCBL membawa masalah karena memberikan dampak pada masyarakat kesukuan lain yang masih menggunakan pola hidup subsisten. Dan dalam kasus ini, masyarakat yang dirugikan oleh HCBL adalah masyarakat Plachimada.

Keberhasilan *Multi National Corporation* seperti HCBL di *host country* sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang memiliki potensi *political risk* adalah sistem politik negara tersebut. Dalam Political System dijelaskan bahwa sistem politik berhubungan dengan partisipasi politik, dan korelasi antara politik budaya. India menganut sistem demokrasi, dan hal ini menentukan bagaimana pola pemerintahan yang berjalan di India. Pola pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya, interaksi antara pemerintah dan rakyat yang kuat berdampak pada tingkat pembentukan kebijakan yang lebih intensif pula. Hal ini menunjukkan arti penting

dari proses deprivasi relatif dimana permasalahan yang dialami oleh masyarakat ditangani oleh negara. Proses deprivasi relatif masyarakat dan kondisi sistem politik ini kemudian memunculkan *political risk* dalam bentuk *policy change*.

*Policy changes* merupakan tipe *political risk* yang terjadi karena pemerintahan setempat mendapatkan berbagai macam pengaruh, seperti partai politik yang berkuasa, tekanan politik dari pihak berkepentingan tertentu, pihak sipil dan sosial tertentu. Perubahan kebijakan ini tentu mengganggu apabila berjalan bertentangan dengan mekanisme perusahaan. HCBL yang pada awalnya mendapatkan keuntungan karena masih belum terbentuknya sistem yang mengatur mengenai konsumsi *groundwater* pada wilayah Kerala akhirnya menghadapi kesulitan pasca perubahan kebijakan oleh Panchayat. Perubahan kebijakan terjadi disebabkan kondisi pemerintahan yang mendapatkan pengaruh dan juga nature dari pemerintahan tersebut. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Plachimada kemudian memberikan pengaruh dimana Perumatty Gram Panchayat berjalan secara efektif dibuktikan dengan respon cepat dalam pembentukan kebijakan untuk menanggapi permasalahan air yang dihadapi masyarakat Plachimada.

Menanggapi *political risk* tersebut, HCBL tetap berupaya untuk mempertahankan investasi di wilayah ini. HCBL menjalankan strategi yang berhubungan dengan teori Political Risk Management. Strategi yang paling terlihat digunakan oleh HCBL dalam menghadapi berbagai tekanan adalah *adaptation*, dan

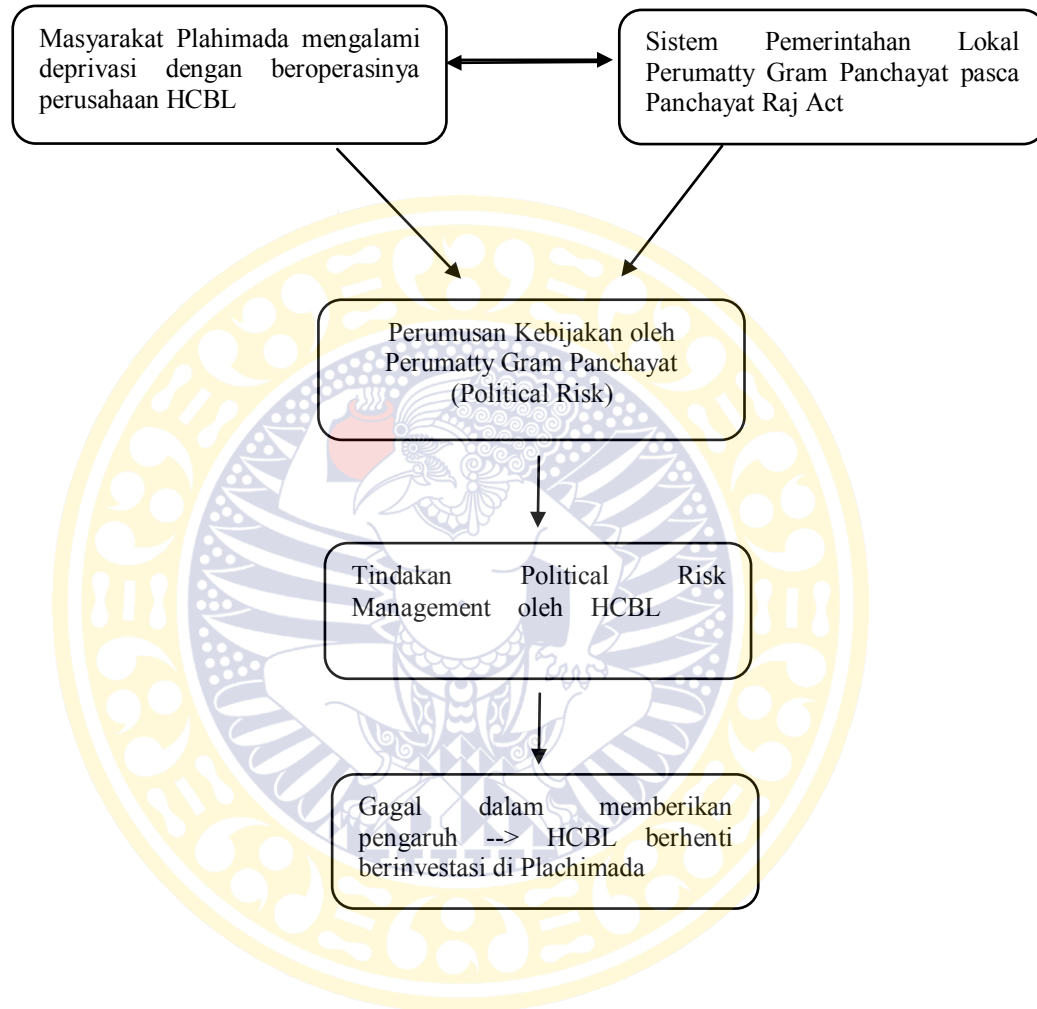


*influencing local politic. Adaptation* dilakukan dengan menunjukkan image bahwa HCBL merupakan perusahaan dengan kredibilitas tinggi dan dengan melakukan penyesuaian budaya antara HCBL dengan *host country*. HCBL mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa ia bukan pihak yang bersalah dan mempertanyakan kredibilitas organisasi-organisasi lingkungan yang melakukan *assessment* terhadap HCBL. *Influencing local politics* dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan hukum oleh pemerintahan dalam suatu negara. Pada kasus ini HCBL melakukan berbagai lobi dengan memanfaatkan secara maksimal kelemahan sistem hukum mengenai air di Plachimada.

### **1.5 Hipotesis**

Dengan memahami latar belakang masalah disertai landasan teori maka dapat dijelaskan bahwa mekanisme Perumatty Gram Panchayat dalam menghentikan investasi HCBL di Plachimada pada tahun 2005 adalah: (1.) Proses deprivasi relatif yang mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan kebijakan pemerintah oleh Perumatty Gram Panchayat , dan (2.) HCBL tidak dapat memberikan tekanan atau pengaruh terhadap keputusan Perumatty Gram Panchayat

### 1.6 Diagram Visualisasi Pemikiran



Keterangan:

↔ : Saling Berhubungan

→ : Menyebabkan

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

#### 1.7.1.1 Konsep Good Governance and Accountability

Good Governance and Accountability adalah syarat esensial bagi negara untuk mencapai perwujudan demokrasi dan perkembangan yang nyata<sup>35</sup>. Secara sederhana governance adalah proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan maupun tidak<sup>36</sup>. Good Governance memiliki ikatan kuat dengan kepedulian terhadap hak manusia, aturan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat yang aktif dalam perkembangannya dan transparansi serta akuntabilitas baik proses maupun institusi. Good Governance dan Accountability memiliki bentuk identik dengan adanya demokrasi yang memiliki 7 karakter utama.

Pertama, “democracy is government in which power and civic responsibility are exercised by all adult citizens directly or indirectly through their freely elected representative”. Kedua, “democracy rests upon the principle of majority rule, which means that decisions are made by authority and have to be accepted by all, but minority viewpoints are respected and protected”. Ketiga, “democracy guard against all-powerful central governments and decentralise government to regional and local levels, understanding that all levels of government must be accessible and responsive to the people as possible”.

<sup>35</sup> George Okiror, “Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability: A guide for Peer Educators”. (Konrad Adenaur Stiftung ,2011). 1-36

<sup>36</sup> UNESCAP, “What is Good Governance?”

<http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>. (diakses pada 5 Desember 2014)

Keempat,” democracies understand that one of their prime function is to protect such basic human right as freedom of speech and religion; the right to equal protection under the law; and the opportunity to organise and participate fully in the political, economic, and cultural life of society”. Kelima, “ democracies conduct regular free and fair elections open to all citizens of voting age”. Keenam,”citizens in a democracy have not only rights, but also the responsibility to participate in political system that, in turn, protect their rights and freedoms”. Terakhir, “democratic societies are comitted to the value of tolerance, cooperation and compromise”<sup>37</sup>.

Perlawanan Plachimada di Kerala dapat terjadi dengan adanya bentuk *good governance*. *Good governance* sangat menunjang adanya interaksi antara masyarakat dan pemerintahan setempat. Tanpa adanya sinergi antara pemerintahan dan masyarakat Plachimada, maka tidak terjadi berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pada perusahaan HCBL. Aspirasi masyarakat Plachimada yang merasakan proses deprivasi oleh perusahaan HCBL tersampaikan dengan baik pada pemerintahan lokal yaitu Panchayat. Disisi lain, Panchayat pun mengambil tindakan cepat dengan memnghentikan lisensi terhadap perusahaan HCBL pada tahun 2003. Peran serta Panchayat di Kerala High Court pula yang sangat kuat sehingga mampu menghentikan operasi HCBL di wilayah Plachimada pada tahun 2005.

---

<sup>37</sup> Okiror,”Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability: A guide for Peer Educators”. 3

### 1.7.1.2 Business Environment Analysis (PESTLE)

Paul Wetherly menjelaskan bahwa *business environment* merupakan suatu ilmu yang penting untuk dipelajari dikarenakan bisnis berjalan pada suatu lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan unik<sup>38</sup>. Suatu keunikan dari lingkungan ini dapat menjadi suatu kemudahan maupun tantangan dalam bisnis. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan cenderung melawan dampak negatif, serta mengeksploitasi manfaat yang didapatkan dari *business environment*<sup>39</sup>. Dalam menghadapi pengaruh negatif tersebut perusahaan melakukan proses *business environment analysis*. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa *business environment*, yaitu: SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dan PEST (*politic, economy, social, technological*)<sup>40</sup>. Untuk membentuk strategi perusahaan yang efektif, perusahaan dituntut untuk mampu memaksimalkan *strength* dan *opportunity* perusahaan, beserta meminimalisir *weakness* dan *threat* perusahaan. Penulis memfokuskan analisis dengan menggunakan metode turunan dari PEST yaitu PESTLE (*politic, economy, social, technology, legal, dan ethic*) dengan mengkorelasikan pada situasi di Kerala, India.

Keputusan HCBL untuk memilih wilayah Plachimada merupakan suatu keputusan yang rasional. Namun, belum diberlakukannya peraturan pemerintah mengenai *ground water* merupakan pedang bermata dua. Disatu sisi, HCBL memiliki

<sup>38</sup> Paul Wetherly dan Dorron Otter, "Introduction: „Business“ and Its „Environment“". (1-30)

<sup>39</sup> Wetherly dan Otter, "Introduction: „Business“ and Its „Environment“".

<sup>40</sup> Wetherly dan Otter, "Introduction: „Business“ and Its „Environment“".

strength dan opportunity untuk mengeksploitasi sumber daya air tersebut sebanyak-banyaknya. Namun disisi lain, HCBL mengabaikan faktor sosial dan politik yang merupakan *weakness* dan *threat* HCBL pada wilayah tersebut. Masyarakat dengan pola hidup yang subsisten tersebut, jelas merasakan secara langsung dampak dari eksploitasi terhadap air tanah. Disisi lain, kesalahan dari manajemen limbah HCBL selanjutnya meningkatkan perasaan *deprived* dari masyarakat Plachimada. Kondisi berjalan semakin buruk karena kondisi politik yang bersifat demokrasi terdesentralisasi di wilayah Kerala. Pemerintahan lokal Perumatty Gram Panchayat kemudian membentuk kebijakan yang dapat menjadi *weakness* dan *threat* dari HCBL. Lebih lanjut teknologi informasi yang berkembang selanjutnya memudahkan persebaran isu ini dibuktikan dengan BBC yang merupakan media massa dengan kredibilitas tinggi mengkonfirmasi kebenaran dari isu ini. Hal ini meningkatkan kondisi *weakness* sehingga HCBL tidak mampu mengelak dari kelemahan sistem operasi *bottling-plant* HCBL di Plachimada, India.

### **I.7.2 Tipe Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan tipe deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan variabel untuk menjabarkan suatu keadaan dan fenomena dengan menggunakan prosedur ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang diteliti<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006): 22, 28-9.

### **I.7.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian merupakan jangkauan yang digunakan oleh penelitian dengan tujuan memberi fokus permasalahan pada wilayah dan periode tertentu. Penelitian ini mengambil jangkauan pada tahun 2002 hingga 2005. Pertimbangan dalam jangkauan tahun ini adalah tahun 2002 yang merupakan awal mula kemunculan perlawanan masyarakat dan Perumatty Gram Panchayat. Sedangkan tahun 2005 merupakan tahun berakhirnya investasi *bottling plant* HCBL di wilayah Plachimada, Kerala, India.

### **I.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur sebagai sumber data primer. Studi literatur dilakukan dengan proses membaca, evaluasi dengan tujuan memperkaya definisi, kata kunci, dan terminologi untuk menunjang pemahaman peneliti mengenai topik permasalahan yang diteliti<sup>42</sup>. Peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal ilmiah melalui media cetak maupun media elektronik menggunakan internet, dimana data-data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>42</sup>Laura Roselle dan Sharon Spray, "Scholarly Literature and The Literature Review", dalam *Research and Writing in International Relations*, 17-34 (New York: Pearson Longman).

### I.7.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis menggunakan teknik ini karena data mayoritas berada dalam wujud teks. Data-data dalam wujud teks tersebut dipaparkan dalam penelitian dengan tujuan memperkuat argumen penulis dan memperkaya bahan. Pemaparan data dalam wujud gambar pada penelitian ini ditujukan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap penelitian dan juga sebagai data penunjang data-data lain yang berhubungan. Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pemahaman dalam penarikan kesimpulan<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup>Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 31.



### 1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian berjudul “Kegagalan HCBL dalam Political Risk Management: Plachimada Anti Coca-Cola Movement 2000 - 2005” secara sistematis dijabarkan dalam lima bab.

**Bab I** Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan beserta kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.

**Bab II** Membahas mengenai *good governance* yang merupakan bentuk sistem politik Kerala pasca diberlakukan kebijakan Panchayat Raj Act 1994 dan tantangannya. Diuraikan sejarah, kondisi politik, dan hukum yang mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan Kerala.

**Bab III** Membahas mengenai kondisi masyarakat Plachimada hingga melakukan Perlawanan terhadap HCBL. Dijelaskan kondisi sosial masyarakat Plachimada yang terdeprivasi pasca investasi HCBL di Plachimada dan pengaruhnya dalam memunculkan gerakan solidaritas yang lebih besar.

**Bab IV** Membahas mengenai tindakan Political Risk Panchayat terhadap HCBL melalui tindakan Legal dan Etik. Diuraikan bentuk perlawanan pemerintahan Panchayat terhadap HCBL di Kerala High Court dengan menggunakan kekuatan dari kebijakan Panchayat Raj Act 1994.

**Bab V** Merupakan penutup dan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dalam bab-bab sebelumnya.